



Kerjasama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Daewoo Shipbuilding Marine Engineering dalam Pengadaan Kapal Selam sebagai Upaya Pemenuhan *Minimum Essential Force* Militer Republik Indonesia

Wawan Budi Darmawan

Departemen Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Indonesia;
email: wawan.budi.darmawan@unpad.ac.id

Jafar Alkadrie

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Indonesia;
email: alkadriejafar@gmail.com

Arfin Sudirman

Departemen Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Indonesia;
email: arfin.sudirman@unpad.ac.id

Dikirim:
9 Januari 2020

Direvisi:
25 Januari 2020

Diterima:
30 Januari 2020

Dipublikasikan:
31 Januari 2020

Keywords

Defence Industry, Geographical Condition, Military Industrial Complex, Submarine

ABSTRACT

Indonesia is indeed called the largest archipelago country in the world, because of its strategic location between the continents of Asia and the continent of Australia. Plus close to the Pacific Ocean and Indian Ocean. Because of this relationship, Indonesia has a wealth of natural resources that can affect several factors such as Indonesia's economic, political and national security. This causes Indonesia to have threats with national defense and security at sea, such as threats that affect the concept and strategy of national defense and arise not only due to Indonesia's geographical relations, but also influenced by globalization factors in the post-Cold War era, as well as the development of strategic environments continues to grow dynamically. To anticipate threats that will arise both home and abroad, Indonesian military forces must have strong preparations from both weaponry and other weapons. Although Indonesian military forces are among the 20 strongest militaries in the world, in terms of weaponry and other military equipment, military equipment in Indonesia is still inadequate from other countries' military equipment. By looking at current world developments, Indonesia should renew its military strength from both military weapons and military weapons to anticipate threats that are likely to emerge both from within and outside the country. However, when viewed at this time, the limited procurement of weapons and military weapons was caused by brokers that emerged between the relations between the two countries in the procurement of

these goods. This can be seen from the existence of a cooperative relationship between Indonesia and South Korea in the procurement of submarines which is not separated from the presence of brokers in Indonesia where the quality of alusista from South Korea is still inadequate quality from Russian submarines causing losses to the Indonesian government.

Kata Kunci

Kapal Selam, Kondisi Geografis, Industri Pertahanan, *Military Industrial Complex*

ABSTRAK

Indonesia memang disebut negara kepulauan terbesar di dunia, karena letaknya yang strategis yaitu diantara benua Asia dan benua Australia. Ditambah berdekatan dengan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Karena hubungan tersebut Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat mempengaruhi beberapa faktor seperti ekonomi, politik, dan keamanan nasional Indonesia. Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki ancaman dengan pertahanan dan keamanan negara di laut, seperti ancaman yang mempengaruhi konsep dan strategi pertahanan negara dan timbul tidak saja disebabkan oleh hubungan geografis Indonesia, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor globalisasi di era pasca Perang Dingin, maupun perkembangan lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis. Untuk mengantisipasi ancaman yang akan muncul baik dalam maupun luar negeri, kekuatan militer Indonesia harus memiliki persiapan yang kuat baik dari persenjataan maupun alusista yang lainnya. Walaupun kekuatan militer Indonesia masuk kedalam 20 militer terkuat di dunia, namun dari segi persenjataan dan alusista lainnya kelengkapan militer di Indonesia masih belum memadai dari kelengkapan militer negara lainnya. Dengan melihat perkembangan dunia saat ini, seharusnya Indonesia memperbaharui kekuatan militer baik dari persenjataan militer maupun alusista militer untuk mengantisipasi ancaman yang kemungkinan akan muncul baik dari dalam maupun luar negeri. Namun apabila dilihat saat ini, terbatasnya pengadaan persenjataan dan alusista militer dikarenakan adanya broker – broker yang muncul antara hubungan dua negara dalam pengadaan barang tersebut. hal tersebut dapat dilihat dari adanya hubungan kerjasama antara Indonesia dan Korea selatan dalam pengadaan kapal selam yang mana hal tersebut tidak lepas dari adanya broker di Indonesia dimana kualitas alusista dari Korea Selatan secara kualitas masih kurang memadai dari kapal selam Rusia yang menyebabkan kerugian bagi pihak pemerintah Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia memang disebut negara kepulauan terbesar di dunia, karena letaknya yang strategis yaitu diantara benua Asia dan benua Australia. Ditambah berdekatan dengan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Karena hubungan tersebut, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat mempengaruhi beberapa faktor seperti ekonomi, politik, dan keamanan nasional Indonesia. Letak strategis tersebut

menguntungkan Indonesia karena posisi pada persilangan di jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Jalur tersebut berada pada perairan Pasifik dan kawasan Asia Timur yang menuju kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Jadi, Indonesia merupakan wilayah transit dari banyak negara yang menggunakan jalur perdagangan ini juga negara-negara yang memiliki kepentingan.

Konsekuensinya, Indonesia memiliki ancaman dengan pertahanan dan keamanan

negara di laut, seperti ancaman yang mempengaruhi konsep dan strategi pertahanan negara dan timbul tidak saja disebabkan oleh hubungan geografis Indonesia, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor globalisasi di era pasca Perang Dingin, maupun perkembangan lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh bangsa atau negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan strategis tersebut dapat disebabkan oleh penggunaan sistem atau teknologi yang sama, adanya konvensi kesepakatan yang harus ditaati, dan munculnya intervensi suatu negara yang memiliki kekuatan atau pengaruh terhadap negara lain. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan ancaman keamanan tradisional (perang antar negara) pada lingkup global. Tetapi keharmonisan tersebut akan terganggu pada hubungan internasional suatu negara karena akan memunculkan isu-isu ekonomi, politik, dan keamanan.

Namun apabila kita melihat kondisi militer Indonesia saat ini, pentingnya Indonesia untuk mengembangkan pertahanan sendiri. Indonesia perlu menumbuhkan kemampuan alutsista yang berdasarkan pada kemampuan yang terencana. Meningkatkan kemampuan pertahanan untuk meningkatkan kekuatan militer Indonesia. Lalu, untuk meningkatkan kemampuan tersebut Indonesia terus melakukan kerjasama dengan negara-negara maju di bidang pertahanan.

Permasalahan yang terjadi di bidang pertahanan negara Indonesia saat ini adalah alutsista pertahanan nasional yang mulai habis termakan waktu, kesejahteraan prajurit pun sangat memprihatinkan, dan dana alokasi untuk pertahanan drastis sangat sedikit sehingga permasalahan tersebut mendorong Indonesia untuk memperbaiki keadaan dalam segi pertahanan.

Diketahui, kekuatan militer di Indonesia saat ini masih pada tahap memenuhi Minimum Essential Force, karena memang secara teknologi militer Indonesia sangat tertinggal dari negara-negara tetangga di kawasan

ASEAN. Tapi bukan berarti secara keseluruhan militer Indonesia dibawah kedua negara tersebut, karena kekuatan militer suatu negara tidak hanya dilihat dari teknologi militer, melainkan masih ada aspek lainnya yang harus dipertimbangkan. Seperti, Indonesia memiliki jumlah personel dan satuan tempur terbanyak diantara negara-negara ASEAN dan paling banyak memiliki markas-markas serta satuan militer.

Namun apabila kita lihat direntang waktu 10 tahun terakhir, banyak kemajuan kekuatan dan persenjataan TNI berkembang sangat signifikan sejalan dengan kebijakan Presiden SBY untuk meningkatkan kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force. Pemerintah mengalokasikan anggaran pertahanan setiap tahun dalam APBN 2013. Peningkatan anggaran terus meningkat tajam dari tahun 2004 Rp 21,42 T menjadi Rp 83,4 T lebih pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan hampir 400%. Data yang dirilis oleh *Global Fire Power Index* (GFP Index), kekuatan militer Indonesia berada di tingkat rata-rata di kawasan Asia Tenggara, bahkan mengalahkan Australia pada tahun 2015 lalu.

Dalam skala global di tahun 2014, Indonesia menduduki peringkat 19 dunia sebagai negara yang memiliki kekuatan militer kuat dengan jumlah populasi lebih dari 250 juta penduduk, sedangkan personel militer Indonesia bisa mencapai 129.075.180 orang. Hal ini dapat dilihat secara keseluruhan, personel militer Indonesia sebanyak 107,5 juta lebih adalah siap untuk maju dalam berperang jika dibutuhkan, dan sekitar 476 ribu personel diantaranya merupakan personel sebanyak 400 ribu yang siap berada di garis depan pertahanan sebagai cadangannya. Ditambah, Indonesia juga memiliki special force army (Kopassus) yang menjadi salah satu tentara khusus yang sangat ditakuti dunia.

Apabila kita bandingkan dengan negara terdekat Malaysia dalam segi militer, Malaysia hanya memiliki 110 ribu personel militer utama, 296 ribu personel militer cadangan dari total populasi 30 juta penduduk. Sedangkan

Singapura memiliki 72 ribu personel militer aktif, 300 ribu personel cadangan, dan 2 juta personel utama.

Dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, militer merupakan komponen utama yang memegang peranan penting dalam menghadapi ancaman dan tantangan. Baik pada negara maju maupun negara berkembang, kekuatan militer ini dikembangkan secara pesat dan menjadi sangat prioritas karena dianggap memiliki pengaruh yang besar. Asumsinya, semakin besar kekuatan militer yang dimiliki suatu negara, semakin besar pula *bargain of power*-nya. Dari hal inilah, kondisi yang menguntungkan yang dapat suatu negara miliki untuk pengaruh positif terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, dan keamanan di wilayah regional dan internasional. Tidak heran jika suatu negara memiliki keinginan yang kuat untuk meningkatkan kekuatan militernya yang masuk di urutan ke-20 dalam peta kekuatan militer. Realita ini diharapkan mampu mendongkrak semangat masyarakat sipil dan non sipil untuk terus meningkatkan kekuatan militer Indonesia.

Di era modern saat ini, Indonesia sudah seharusnya menata kembali postur pertahanannya dalam ancaman yang akan terjadi. Pada dasarnya komponen utama pertahanan Indonesia berada dibawah kendali TNI. Dalam hal ini, Indonesia perlu melakukan transformasi dahulu dalam TNI dan Indonesia juga harus mencontoh beberapa negara-negara maju, seperti Israel, Amerika, dan Inggris, dimana mereka sudah menerapkan konsep *Revolution in Military Affair* (RMA). Konsep ini menjelaskan tentang bagaimana suatu negara melakukan perubahan yang drastis dalam mengubah kekuatan militernya untuk menjadi lebih baik. RMA mengemukakan bahwa revolusi militer terjadi apabila ada penerapan teknologi. Pada dasarnya, pengaruh utama pada perubahan kekuatan militer suatu negara memang ada di teknologinya. Hal tersebut bisa dilihat dari terciptanya berbagai macam senjata yang modern. Dari berbagai temuan senjata modern

iniilah pengadopsian dari penerapan RMA yang sudah dilakukan negara-negara maju.

Salah satu hal penting memperkuat militer adalah unsur anggaran yang dianggap memiliki pengaruh kuat terhadap pengembangan militer suatu negara. Di tahun 2013, Indonesia merencanakan pendapatan anggaran belanja militer sebesar Rp 77T. Dimana anggaran tersebut diharapkan membawa perubahan yang drastis pada kekuatan militer Indonesia.

Kenaikan anggaran tersebut, menunjukkan pemerintah perlu menyadari betapa pentingnya meningkatkan kekuatan militer Indonesia. Melalui anggaran yang besar tersebut, Indonesia diharapkan mampu mengadakan alutsista yang baru, serta berbagai senjata militer yang dianggap sudah usang. Indonesia dianggap akan memuluskan target MEF-nya, karena Indonesia diyakini memiliki SDM yang memadai, wilayah yang luas dan strategis, dan anggaran pertahanan yang cukup besar.

KERANGKA KONSEPTUAL

Military Industrial Complex

Indonesia merupakan negara yang dibentuk dari sebuah perjuangan melepaskan diri dari jajahan negara lain. Perjuangan yang dilakukan Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya bukan hanya dalam bentuk perjuangan damai melalui jalur diplomasi, tapi juga dalam bentuk perjuangan fisik melewati perang atau gencatan senjata. Latar belakang tersebutlah yang memberikan pengaruh yang cukup besar pada sistem pertahanan yang sudah terbentuk di Indonesia saat ini.

Lihat saja pada UU No. 3 Tahun 2002 mengenai Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari

segala ancaman. Indonesia menganut sistem pertahanan semesta atau *total defence* yang mencakup konsep pertahanan militer (*military defence*) dan pertahanan non militer (*non military defence*).

Dalam Buku Putih Pertahanan tahun 2008 dikatakan Indonesia pada penyelenggaraan pertahanan negara tidak semata-mata ditujukan untuk perang, tapi juga dimaksudkan untuk mewujudkan perdamaian, mengamankan kepentingan nasional, menjamin keutuhan RI, juga menjamin terlaksananya pembangunan nasional. Lalu, pertahanan juga bisa dikatakan efektif jika pertahanan tersebut mampu menghadirkan suasana aman dan damai, di mana kehidupan masyarakat berjalan dengan normal dan komunikasi hubungan sesama negara dikatakan baik pada wilayah kawasan tetangga maupun di luar kawasan yang berlangsung secara harmonis dan saling menghargai.

Berbicara mengenai sistem pertahanan, tentu saja juga harus menyentuh persoalan strategi pertahanan yang dijalankan Indonesia. Strategi pertahanan ini difokuskan pada inti pertahanan. Dalam menghadapi ancaman terhadap ketahanan nasional sendiri, TNI sebagai komponen utama pertahanan negara mempunyai kebijakan berupa strategi penangkalan, strategi penindakan, dan strategi pemulihan yang sudah disiapkan dalam menghadapi macam-macam bentuk ancaman. Ancaman bisa dari militer atau pun ancaman non militer, yang bisa timbul dengan ancaman lain dan sudah ditetapkan oleh Presiden.

Postur pertahanan adalah salah satu hal juga penting dalam sistem pertahanan negara. Dalam sebuah rumusan, Kementerian Pertahanan menyebutkan bahwa postur pertahanan Indonesia meliputi tiga komponen utama. Tiga komponen tersebut adalah kemampuan, kekuatan, dan gelar. Komponen kemampuan meliputi kemampuan dalam pertahanan, strategik intelijen, operasi militer yang dikategorikan bukan perang, dan kemampuan dalam dukungan yang tidak bisa dilakukan jika tidak optimal karena

terbatasnya alutsista, SDM, sarana dan prasarana, serta terbatasnya dukungan anggaran.

Terbatasnya alutsista dan teknologi pertahanan memunculkan *Military Industrial Complex* (MIC). MIC merupakan frasa yang digunakan oleh Presiden Eisenhower, ketika peringatan dari hubungan yang erat antara pemerintah dengan industri pertahanan. Konsep MIC umumnya digunakan untuk merujuk kepada kebijakan dan hubungan keuangan antara legislator, angkatan bersenjata nasional, dan industri pertahanan. Hubungan ini termasuk kontribusi politik, persetujuan politik untuk belanja senjata, melobi untuk mendukung birokrasi, dan pengawasan industri (Acheson, 2017). Singkatnya, MIC merupakan sebuah aliansi informal antara militer suatu negara dan industri senjata yang memasok sebagai kepentingan yang mempengaruhi kebijakan publik.

Meskipun MIC sulit didefinisikan, cukup untuk Eisenhower untuk membentuk garda depan transformasi politik-ekonomi yang lebih luas, salah satunya melibatkan struktur masyarakat. Pada waktu itu, upaya untuk melawan ancaman eksternal dari Soviet sangat ditakuti pada pemerintahan Eisenhower. Jadi, industri pertahanan dan bagian kelompok ilmiah-teknologi “membajak” kebijakan publik. Sementara, belanja pertahanan dihilangkan untuk membentuk keseimbangan antara ekonomi publik dan swasta agar dapat membuat kontrak-kontrak pemerintah. Saat itu, kepentingan umum di Amerika terbengkalai hal ini menimbulkan kritik. Seiring berjalannya waktu, urgensi pada MIC mempersiapkan untuk negara dan masyarakat.

Geoffrey Perret dalam Milburn (2010) mengatakan MIC menunjukkan peran penting untuk memainkan dalam penyebaran industri militer, lain hal dengan James Ledbetter (2011) mengatakan *stubborn misconception* tidak didukung berdasarkan bukti. Douglas Brinkley (2001) mengatakan MIC adalah

ilmiah sedangkan Henry Groiux (2007) mengatakan MIC itu adalah akademik.

Mills dalam Riefler (1947) mengemukakan dalam bukunya, bahwa dampak militer, bisnis, dan pemimpin politik didorong oleh kepentingan bersama adalah nyata dari pemimpin negara yang efektif dan di luar kendali juga demokratis. Selain itu, Friedrich Hayek (1976) juga mengemukakan sebelumnya, dukungan organisasi industri tidak cocok karena dapat memonopoli industri pertahanan dari sisa-sisa politik di PD II lalu. Unsur lain setelah PD II kemungkinan akan memperkuat kecenderungan ke arah perang yang terkontrol secara koersif dan akan merasa sulit untuk berdamai.

Secara umum alutsista Indonesia dari segi kualitas dan kuantitas masih harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi geografi Indonesia. Masalah penting lain dalam sistem pertahanan Indonesia adalah teknologi. Kekuatan pertahanan negara dunia saat ini tidak hanya sekedar didukung oleh *man power* aktif yang besar. Ketersediaan alutsista modern yang dilengkapi teknologi mutakhir yang canggih, juga ikut mempengaruhi kekuatan pertahanan suatu negara. Negara dengan wilayah dan jumlah penduduk kecil seperti Singapura, karena memiliki alutsista yang modern dan canggih, menjadi diperhitungkan.

Sementara itu, menurut Boutin (2009) kemandirian industri pertahanan yang sepenuhnya sebenarnya merupakan hal yang sulit dicapai, bahkan oleh negara maju sekalipun. Penyebaran bahan baku, teknologi, dan efisiensi produksi di beberapa negara membuat sebagian pelaku industri pertahanan saling mendukung. Kesulitan negara-negara berkembang untuk mencapai kemandirian industri pertahanan yang sepenuhnya bahkan lebih besar akibat keterbatasan sumber daya, termasuk keuangan, teknologi, dan infrastruktur.

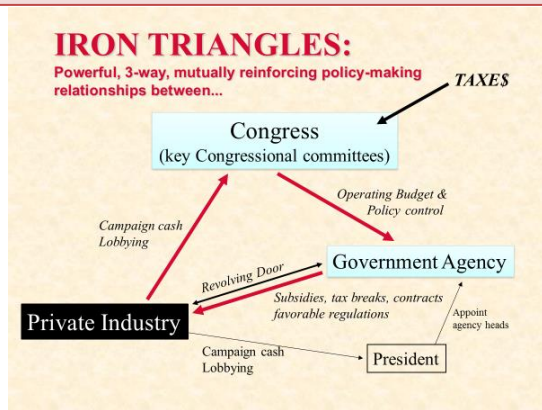
Dalam hal ini, konsepsi mengenai kemandirian alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpahankam) seharusnya tidak

hanya diartikan sebagai kemandirian dalam memproduksi alat-alat pertahanan. Arti luasnya, kemandirian juga diartikan sebagai kemandirian dalam membeli, menggunakan, merawat, dan membuat alat-alat pertahanan. Bagi negara-negara yang tidak masuk aliansi pertahanan mana pun, apalagi bagi negara yang pernah mengalami embargo militer seperti Indonesia, definisi atau pengertian tersebut sangat penting.

Adanya kesenjangan pada sumber daya dan penguasaan teknologi antara negara produsen dan negara yang membutuhkan alat-alat pertahanan membuat negara produsen, terutama negara kuat, memiliki control atas produk-produk yang dijualnya nanti. Kontrol ini termasuk dalam hal menentukan kepada siapa akan menjual produk, penyediaan suku cadang untuk perawatan, hingga bagaimana alih atau transfer teknologinya.

Munculnya konsep *iron triangle* (segitiga jangka besi) sebetulnya sudah dipaparkan dalam analisa-analisa di atas untuk menganalisa MIC dalam mendukung pembelian dan pembuatan senjata untuk pertahanan negara. *Iron triangle* menunjukkan bahwa keselarasan kepentingan dan tindakan tersebut terdapat di 3 aktor kunci dalam pembuat kebijakan (studi kasus di Amerika), seperti *private industry*, komite pengawasan atau lembaga legislative, dan badan pengawas atau birokrasi lainnya. Hasil dari kesepakatan dari *iron triangle* adalah memproduksi keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan untuk menimbulkan suatu kebijakan peraturan untuk mengatur promosi industri (Mitnick, 1980).

Gambar 2.1 Konsep Iron Triangles



Menurut Collins (2014), *Iron triangle* merupakan sebuah konsep bukan lembaga. Gagasan tersebut menunjukkan bahwa komite di AS seperti DPR dan Senat, departemen, dan badan-badan federal, dan analis dan kelompok kepentingan semuanya bekerja sama untuk mengembangkan dan menghemat daya kebutuhan mereka sendiri, dan memperluas pengaruh politik mereka (AS).

Ketiga kelompok yaitu Kongres atau komite, birokrasi (*government agency*), dan kepentingan-kepentingan kelompok (*private industry*), adalah memiliki hubungan yang saling ketergantungan. Misalnya, demi sebuah kepentingan komite selalu dihadapkan pada isu yang paling utama, dana yang akan dikeluarkan dan nantinya akan mempengaruhi pekerjaan birokrasi, serta memperluas tujuan bersama dan berdampak pada *influence*. Kepentingan kongres dan birokrasi agar kelompok kepentingan (*Private industry*) puas, karena sebagai kelompok kepentingan mereka selalu menyediakan kebijakan-kebijakan, agar dana yang didapat atau dimiliki tidak dihabiskan dengan boros seperti untuk sumbangan kampanye atau bentuk bantuan politik.

Di Amerika, dalam rangka untuk meluluskan suatu undang-undang yang berkualitas, Kongres membutuhkan banyak akses untuk penelitian dan keahlian. Sangat mustahil sekali bagi Kongres maupun birokrasi untuk mempekerjakan tim ahli untuk menangani setiap masalah yang sebelumnya

atau yang akan datang. Dalam hal ini, kelompok kepentingan seperti lembaga-lembaga sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena kelompok kepentingan memiliki ahli dan pengetahuan khusus dan dapat membantu Kongres dalam mengolah undang-undang. Bagannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini;

Gambar 2.2. Konsep Defense Iron Triangle



Faktanya, jajak pendapat publik secara konsisten menunjukkan bahwa sekitar 75% dari masyarakat menikmati pengurangan anggaran pertahanan. Sebaliknya, dukungan untuk meningkatkan belanja militer mendapatkan dukungan sekitar 4% di Kubu Demokrat dan 15% di kubu Republik.

Maritime Security

Maritime security atau keamanan maritim adalah salah satu istilah terbaru dalam praktek hubungan internasional. Aktor utama dalam kebijakan maritim adalah tata kelola laut dan keamanan internasional. Diskusi mengenai keamanan maritim selalu merujuk pada *threats* yang biasanya muncul di wilayah maritim. Bentuk ancamannya seperti, sengketa wilayah perairan antar negara, terorisme di laut, pembajakan, penyelundupan, *illegal fishing*, kejahatan lingkungan, atau kecelakaan di laut atau bencana (Kraska and Pedros, 2013).

Bentuk ancaman tersebut tidak harus didefinisikan masuk di wilayah keamanan maritim karena pendekatan itu memunculkan permasalahan. Apakah keamanan maritim ada karena bentuk ancaman tersebut saling terkait atau bentuk ancaman tersebut dapat diatasi (Klein, 2011). Apalagi dengan munculnya perubahan iklim dan bencana yang seharusnya termasuk dalam isu keamanan maritim atau keamanan nasional.

Definisi dari Nathalie Klein menyebutkan, tidak adanya berbagai ancaman yang memberikan konsep positif yang dapat memproyeksikan pendekatan yang stabil dan peningkatan penegakan hukum di laut, agar dapat berlanjut untuk suatu tujuan yaitu perekonomian negara. Jadi, Klein memaparkan dengan adanya koordinasi, berbagi informasi, regulasi, penegakan hukum, dan pembangunan kapasitas adalah definisi internasional dari keamanan maritim.

Kemudian, muncullah konsep keamanan maritim bahwa keamanan maritim selalu tidak jauh dari kepentingan politik (Barnett, et.al., 2007). Adanya perbedaan pendapat dan koordinasi yang lemah menyebabkan konsep keamanan maritim menjadi situasi yang kritis dan memunculkan aktor-aktor untuk mengambil tindakan (seperti *de facto*).

Dalam studi keamanan, analisa Barry Buzan berada diantara dua interaksi pemikiran yang berbeda, yaitu kelompok yang tradisional mengenai keamanan dan kelompok yang menggunakan metode tradisional mengenai keamanan sendiri dan kelompok non tradisional. Kelompok tradisional cenderung untuk membatasi konsep keamanan (*de-securitization*), sedangkan kelompok non tradisional memiliki kecenderungan untuk memperluas (*securitization*) (Buzan, et.al., 1998).

Timothy D. Hoyt menggambarkan, pemikiran tradisional didefinisikan pada masalah-masalah keamanan sebagai kegiatan pencarian keamanan oleh negara dan kompetisi antar negara untuk keamanan, misalnya diwujudkan melalui konfrontasi,

perlombaan senjata (*arms race*) dan perang. Jadi, bentangan keamanan menurut pemikiran ini didasari masalah antar negara (*interstate problem*). Sedangkan yang kedua adalah pemikiran non tradisional, yang menyatakan keamanan semacam ini tidak mencukupi, jadi harus memasukkan masalah keamanan intra negara (*interstate security problem*) dan masalah keamanan lintas nasional (*trans-national security problem*). Yang dimaksud dengan masalah keamanan intra-negara, seperti ancaman-ancaman keamanan yang berasal dari isu-isu kependudukan seperti migrasi, lingkungan hidup, dan sumber daya yang lingkungannya tidak dapat dibatasi pada skala nasional. Bahkan selain itu, ada fokus-fokus yang dialihkan dari unit analisis negara kearah unit analisis kelompok dan individu dengan berbagai isu yang sifatnya non militer, seperti keamanan pangan, kesehatan, keamanan lingkungan, *economy security*, dan keamanan politik.

Banyaknya konsep-konsep dari keamanan maritim yang dikembangkan seperti adanya 4 unsur dari konsep keamanan maritim, *sea power*, keamanan laut, *blue economy*, dan ketahanan manusia. Masing-masing dari unsur tersebut mengarahkan kepada dimensi yang berbeda dari keamanan maritim. Di lain sisi, keamanan maritim juga penting memproyeksikan kekuatan maritim dari unsur *sea power*. Dari pemahaman tradisional ini, keamanan nasional merupakan perlindungan langsung dari negara dan *sea power* yang dikhususkan untuk meletakkan peran angkatan laut dan mengelaborasi strategi (Till, 2004).

Banyak pengamat untuk keamanan maritim, tampaknya menjadi konsep besar dan kurang jelas. Bahkan melibatkan banyak entitas dari sektor internasional, publik, dan swasta bertujuan:

- Melestarikan kebebasan laut,
- Memfasilitasi dan membela perdagangan
- Mempertahankan pemerintahan yang baik di laut

Keamanan maritim harus dibedakan dari *maritime safety* (keselamatan maritim), karena dari pengertian tersebut langkah-langkah pencegahan dan responsive untuk melindungi wilayah maritim terhadap ancaman dan tindakan yang melanggar hukum (secara sengaja). Sedangkan, *maritime safety* dimaksudkan untuk melindungi wilayah maritim dari perbuatan yang disengaja atau alami, bahaya, kerusakan lingkungan yang menimbulkan resiko atau kerugian (Wise en Final Report, 2010).

Keamanan maritim adalah tanggung jawab pemerintah, tapi kewenangan untuk tindakannya adalah keputusan yang sah jika pemilihan keputusannya berbeda. Meliputi banyak sektor kebijakan di bagian keamanan maritim, bagian tersebut adalah:

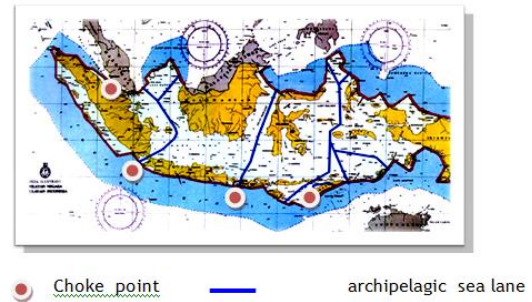
- Perdamaian internasional dan keamanan nasional
- Keamanan laut di garis komunikasi
- Perlindungan dari kejahatan untuk keamanan di laut.
- Keamanan sumber daya, seperti akses ke laut dan di dasar laut
- Perlindungan melalui lingkungan hidup
- Pelaut dan nelayan juga butuh keamanan

Mengacu pada tanggung jawab untuk keamanan maritim, semua negara memiliki tanggung jawab untuk menandatangani UNCLOS (2017) dan menjadikan *good governance in the sea*. Dapat disimpulkan, keamanan maritim tidak dapat didefinisikan secara universal, tetapi lebih kepada *comprehensive approach* (pendekatan komprehensif) karakter laut yang berubah. Dari pendekatan komprehensif pula kolaborasi antara otoritas nasional dan internasional sangat diperlukan.

Dalam memahami pentingnya keamanan maritim (*Maritime Security*) bagi Indonesia, kita harus tahu betul dengan peninjauan wilayah-wilayah laut di Indonesia seperti letak geografinya dan berbagai keunikan yang ada

di dalamnya. Untuk memahami pemahaman tersebut, lihat gambar di bawah ini:

Gambar Geografi Indonesia



Pada Gambar tersebut diketahui, yaitu:

- a. Pulau-pulau besar di Indonesia, beberapa puluh pulau yang sedang, dan belasan ribu pulau kecil.
- b. Pulau-pulau yang dikelilingi oleh perairan laut yang luas.
- c. tersimpannya kekayaan alam di darat maupun di laut
- d. Jalan yang terbuka dari berbagai penjuru di laut (posisi yang strategis)

Pada akses yang terbuka ini, tidak dapat dipungkiri bahwa keunikan tersebut akan menimbulkan berbagai masalah yang sebagian besar seharusnya sudah diantisipasi dan harus dihadapi juga. Tapi dalam beberapa bagian dimana Indonesia belum siap untuk mengantisipasi dari masalah-masalah seperti ancaman yang akan timbul.

Dalam persiapannya di bidang keamanan maritim, Indonesia dapat mengembangkan strategi di bawah ini:

- a. Kemampuan pertahanan untuk mencapai MEF harus ditingkatkan
- b. Industri dari pertahanan nasional harus diberdayakan
- c. Harus ada tindakan pencegahan dan penanggulangan dari masalah keamanan dan pelanggaran hukum di laut, contohnya penangkapan ikan secara illegal atau perompakan
- d. Adanya rasa aman dan masyarakat yang tertib dan harus ditingkatkan

- e. Pendeteksian keamanan nasional yang dimodernisasi
- f. Kualitas kebijakan dari keamanan nasional yang ditingkatkan

Pada prakteknya, laut adalah medium pertahanan Indonesia, ini disebabkan kondisi geografik Indonesia menunjukkan Indonesia memiliki perairan seluas 70% daripada luas daratan yang hanya 30%. Penjelasan tersebut menunjukkan kekuatan nasional maritim harus dibangun pada konteks yang tepat. Diambil dari konsep dasar keamanan maritim yang memiliki tiga bagian pokok, yaitu (i) strategi keamanan maritim nasional yang memunculkan kebijakan nasional, (ii) memiliki akar manajemen operasional yang kokoh, (iii) postur pertahanan yang diwujudkan dengan cara yang efektif dan efisien.

Karena keberadaan Indonesia di posisi silang dunia menjadikan tugas-tugas di atas tersebut menjadi semakin rumit. Ini diartikan, postur kapabilitas laut Indonesia diperlukan untuk mengamankan wilayah jalur lalu lintas kepentingan nasional di wilayah yuridiksi nasional atau ALKI, dimana standar keamanan internasional perlu ditingkatkan juga. Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang letaknya strategis pada tataran geopolitik dunia. Indonesia dijadikan sebagai inti stabilitator di kawasan Asia Tenggara karena posisi perairannya yang menduduki dua pertiga kawasan. Maka, wilayah yuridiksi nasional dapat dikatakan sebagai patokan untuk situasi dan kondisi keamanan maritim di Asia Tenggara.

Tidak hanya itu, dengan berbatasan dengan Samudera Hindia, Indonesia juga menjadi bagian penting dari kepentingan perekonomian dunia dan juga jalur komunikasi laut yang menjadikannya kawasan perairan yang penuh kompetisi (*Sea Lanes of Communication/SLOC*) dan jalur perdagangan laut (*Sea Lanes of Trade/SLOT*). Hubungan kedua tersebut menjadikan Indonesia adalah sesuatu yang vital bagi perdagangan

internasional (2009). Sebab itu, stabilitas keamanan maritim di Indonesia pada perairan yuridiksi adalah sesuatu yang tidak bisa dikompromikan, karena laut dikategorikan sebagai sumber nafkah, pertahanan, dan pemersatu bangsa, dan Indonesia dituntut untuk bertanggung jawab menjaga dan menjamin stabilitas keamanan maritim di kawasan (Marsetio, 2011). Lagipula, Indonesia juga dituntut untuk mampu menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran seluruh pengguna laut (UNCLOS, 1982).

Maritime Security merupakan bentukan dari geopolitik karena keamanan maritim sendiri sangat dekat dengan kondisi geografis Indonesia yang berupa laut dan pesisir serta konsep keamanan saat ini berkembang dengan proses integrasi masyarakat dalam menghadapi ancaman politik. Seperti memanfaatkan perairan laut untuk mendapatkan *power*, menimbulkan *influence*, dan *authority*. Konsep dari negara maritim merupakan negara yang mampu menjaga dan memanfaatkan kawasan lautnya, maka diperlukan sebuah strategi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang tanggung dan berdaulat dalam pembangunannya.

METODE RISET

Dalam artikel ini, penelitian yang digunakan bersifat penelitian kualitatif. Menurut pandangan Ezmir, pendekatan kualitatif lebih mengacu kepada mendeskripsikan dari data-data yang telah dikumpulkan dan mengambil bentuk kata-kata atau gambar ketimbang angka-angka. Pendekatan kualitatif tersebut berfokus kepada hubungan antar manusia sehingga identic dengan pengetahuan professional (professional knowledge) dan pengetahuan klinis (clinical knowledge). Kedua pengetahuan tersebut bergantung pada penelitian kualitatif karena tindakan-tindakan di dalamnya akan ditentukan lewat interpretasi. Penelitian kualitatif juga menekankan kepada manusia sebagai salah satu instrument utama pada penelitian. Manusia merupakan peneliti, objek penelitian,

sekaligus pihak yang melakukan interpretasi dari suatu penelitian.

Penelitian kualitatif tersebut memiliki ciri-ciri seperti: membangun makna sosial budaya interaksi proses dan peristiwa diteliti; bergabungnya komponen-komponen (variable) yang sulit diukur dan kompleks; keterkaitan erat mengenai sebuah konteks; terlibatnya peneliti secara total; penelitian tersebut mempunyai latar belakang alamiah; menggambarkan sampel *purposive*; penerapan analisis yang induktif; makna dibalik realita lebih diutamakan; juga munculnya pertanyaan seperti “mengapa” (why), dan tidak bisa menggunakan “apa” (what”) sebagai pertanyaannya.

Peneliti mendefinisikan variable independen dan variable dependen. Sementara itu, variable ketiga adalah variable kondisi dimana variable independen dan dependen berlaku.

Di samping itu, penelitian ini memiliki pembatasan-pembatasan masalah, yaitu:

1. Masalah pembelian kapal Chang Bogo dari informasi-informasi dan bukti-bukti yang ada
2. Hanya berfokus kepada pembelian kapal Chang Bogo untuk memenuhi MEF
3. Apakah setelah Indonesia membeli dan memiliki 3 kapal selam Chang Bogo, MEF sudah terpenuhi dari segi, industrial complex dan maritime security ?
4. Data-data yang diambil dan didapatkan berdasarkan literatur yang akurat dan beberapa narasumber yang berpengaruh

Menurut pandangan Robert Stake, pada penggunaan metode penelitian kualitatif instrumen utama yang digunakan dalam penelitian adalah manusia. Jadi, keterlibatan manusia dalam penelitian melingkupi berbagai peranana, dari mulai sebagai peneliti, objek yang diteliti, maupun pihak yang melakukan interpretasi terhadap penelitian. Sehingga, pada penelitian yang peneliti lakukan tersebut,

merupakan instrumen utama dalam penelitian yang melakukan berbagai peranan tersebut.

Data-data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah data yang dapat menjawab perumusan masalah, yaitu faktor-faktor kerjasama Kementerian Pertahanan RI dengan Daewoo Shipbuilding Marine Engineering dalam pengadaan kapal selam kelas Chang Bogo dalam upaya pemenuhan MEF RI. Dalam penelitiannya, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis, maka disusunlah tahapan-tahapan penelitian, seperti studi literature yang dilakukan ke berbagai perpustakaan yang menyediakan buku, jurnal, juga dokumen- dokumen yang berhubungan mengenai penelitian tersebut maupun melalui penelusuran internet.

Pengumpulan data dilakukan dengan interview (teknik wawancara) secara langsung dengan pihak-pihak terkait. Untuk penelitian ini menjadikan data primer dalam menunjang dan membantu terlaksananya penelitian ini. Untuk melakukan analisis data, peneliti harus memisahkan berbagai data yang sudah dikumpulkan dan menganalisa data-data yang mendekati fokus dalam penelitian ini. Interpretasi data yang didapat nantinya akan dituang pada sebuah deskripsi dalam bentuk tulisan, grafik, tabel, laporan, atau data angka. Barulah dari data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dikembangkan lewat sebuah deskripsi analisis. Validitas dan reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data yang fungsinya untuk membuktikan keabsahan data yang didapat dan pembuktian kebenaran data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan sebuah data dengan data lainnya atau dapat juga dengan melakukan pengecekan kembali terhadap banyak sumber, seperti narasumber, buku, jurnal, dan berita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Adanya perubahan peta geopolitik dunia karena munculnya globalisasi semenjak Amerika Serikat menyatakan negaranya adalah

pemenang Perang Dingin, diiringi dengan kemajuan teknologi yang mendorong terjadinya signifikansi perubahan dan pengaruh tatanan sosial kehidupan masyarakat. Ditambah lagi dengan pola komunikasi dan hubungan antar negara. Pergeseran peta geopolitik dunia tentu saja terus menerus membuat perubahan pada isu- isu di bidang keamanan dan pertahanan.

Lagipula ditambah dengan banyaknya bermunculan aktor-aktor non negara baru yang memaksakan suatu negara untuk beradaptasi dan cepat tanggap pada segala potensi ancaman yang akan datang nantinya. Apalagi fenomena dari globalisasi memicu suatu negara untuk memunculkan kompetisi yang memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Dari segi letak geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, Indonesia harus membentuk suatu sistem dari pertahanan negara yang memiliki kekuatan dan memiliki daya tangkal yang tinggi, dikarenakan ancaman bisa masuk dari mana saja. Dibutuhkan juga strategi pertahanan yang sudah dirancang dari kekuatan bangsa, baik dari militer dan nirmiliter. Berdasarkan kondisi geografis itulah, Indonesia menetapkan sistem pertahanan semesta dengan strategi pertahanan berlapis sebagai perwujudannya. Strategi tersebut menggabungkan lapis pertahanan yang bermiliter dan nirmiliter sebagai kesatuan pertahanan dan saling berkesinambungan.

Lapisan pada pertahanan militer diibaratkan oleh TNI untuk kekuatan utama dan dilaksanakannya Operasi Militer Perang juga Operasi Selain Perang yang dilengkapi dengan alutsista yang memadai. Ancaman yang timbul tidak hanya ancaman yang berasal dari kekuatan militer negara lain, tapi bisa juga berasal dari dalam negeri seperti munculnya kelompok bersenjata yang sekiranya akan membahayakan stabilitas keamanan nasional, seperti pelanggaran wilayah, invasi – agresi militer, gerakan separatisme, penyerangan terhadap objek nasional, kegiatan spionase, pemberontakan bersenjata, gangguan

keamanan di laut dan udara, terorisme, dan lain sebagainya.

Di dalam ranah pertahanan nonmiliter sendiri merupakan komponen dari strategi pertahanan negara yang sengaja dibentuk untuk tujuan menangkal ancaman nirmiliter, seperti melaksanakan fungsi diplomasi, psikologi, ekonomi, informasi, dan teknologi. Selain itu juga seperti keselamatan umum yang misalnya separatisme melalui perjuangan politik, instabilitas ekonomi dan politik, dan konflik horizontal.

Pembentukan strategi pertahanan negara terdapat dalam tujuh landasan. Pertama, landasan idiil yaitu Pancasila sebagai dasar, falsafah, dan ideologi negara. Landasan kedua merupakan landasan konstitusional, yaitu UUD 1945 yang dimana adalah sumber hukum dan pedoman dalam proses pelaksanaan pertahanan negara. Ketiga adalah landasan yuridis seperti UU RI No.3 Tahun 2002 mengenai pertahanan negara, dimana peranan TNI adalah sebagai pusat komponen yang paling utama dalam pertahanan negara pada ancaman militer juga lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan sebagai komponen utama untuk menghadapi berbagai ancaman nonmiliter.

Landasan yang keempat, landasan historis yang sifatnya psikologis terkait dengan pembentukan identitas serta semangat juang yang muncul akibat kenangan sejarah kolonisasi serta perjuangan bangsa Indonesia di masa lampau untuk memperebutkan kemerdekaan. Landasan kelima merupakan landasan visional di mana kita memandang rakyat Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh dan kemudian diwujudkan dalam wawasan nusantara sebagai konsep geopolitik Indonesia. Landasan yang keenam, yaitu landasan konseptual yang merupakan konsep strategi Indonesia dengan diwujudkannya ketahanan nasional yang bertujuan membentuk dayatangkal nasional yang juga berpengaruh terhadap ketahanan regional dan supra regional.

Terakhir adalah landasan ketujuh yang merupakan landasan doktrinal dan diwujudkan menggunakan doktrin pertahanan negara yang isinya mengenai ajaran serta prinsip fundamental yang ditunjukkan dari pengalaman bangsa Indonesia berdiri sendiri setara dengan bangsa lain di dunia

Pada enam muatan yang terdapat pada doktrin pertahanan yang terdiri dari perspektif bangsa tentang perang, pemegang kendali perang, komponen negara yang terlibat perang, strategi perang, terminasi perang, dan mekanisme pertanggungjawaban. Dalam doktrin tersebut juga terdapat substansi dasar strategi pertahanan, yaitu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (*ends*), sumber daya yang digunakan (*means*), serta cara mencapai tujuan (*ways*). Pada masa damai, doktrin tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pertahanan nasional dalam rangka untuk mempersiapkan daya tangkal pada ancaman dari dalam maupun luar.

Sedangkan pada masa perang, doktrin tersebut juga digunakan sebagai petunjuk penggunaan dan pengalokasian seluruh sumber daya dan kekuatan nasional untuk mempertahankan keamanan nasional. Kita ketahui bahwa alutsista di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI sudah tidak sesuai dengan perkembangan (tidak modern) dan tidak sesuai untuk tata kerja dan perlu diganti. Jadi, pemerintah sangat perlu untuk penetapan peraturan mengenai Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata.

Tentu saja, pengadaan ini merupakan kegiatan untuk memperoleh alutsista TNI yang tahapannya didahului oleh rencana kebutuhan hingga diterimanya alutsista TNI yang fungsinya selaras dengan manfaatnya. Pengadaan alutsista ini sendiri diprioritaskan menggunakan produksi dalam negeri, jika produksi dalam negeri belum memenuhi standar (industri pertahanan dalam negeri), pengadaan alutsista bisa melakukan pemesanan atau pengadaan alutsista dari luar negeri yang dapat dilaksanakan melalui

langsung antar ke pemerintah atau kepada pabrikannya.

Dengan adanya pengadaan alutsista tersebut, membuka jalan lebar bagi TNI, karena 70% alutsista berada pada kondisi sudah tua bahkan berusia minimal 20 tahun. Kendala yang lain terdapat pada pemeliharaan dan perawatan yang menyulitkan karena tidak adanya ketersediaan suku cadang, walaupun ada anggaran tersendiri untuk pembelian suku cadang. Permasalahan lain lagi, tidak tersedianya suku cadang karena tergantung dengan negara pembuat alutsista saat itu. Penyedia tunggal yang juga dipengaruhi banyak oleh perpolitikan.

Selain pengadaan alutsista, pemerintah juga harus mengetahui seberapa banyak anggaran yang harus dipakai untuk mengadakan alutsista untuk beberapa tahun ke depan. Ini dikarenakan, modernisasi dilihat sangat mendesak. Ditambah pada peningkatan intensitas capaian ancaman yang diakibatkan pada perkembangan lingkungan yang strategis dan adanya tuntutan TNI dalam menjalankan profesionalisme TNI dalam tugas dan kewajibannya.

Pada RAPBN di tahun 2013 juga ada tujuh kementerian dari lembaga yang mendapat kucuran anggaran di atas Rp 20T. Penganggaran peraturan alutsista di lingkungan Kementerian Pertahanan sudah ditentukan dalam hitungan secara komprehensif, dari semua kebutuhan untuk memelihara dan kebutuhan kemampuan pertahanan negara. Dalam menghadapi ancaman aktual dan potensial sesuai dengan prioritas perwujudan MEF, prioritas kebijakan anggarannya harus diarahkan untuk:

- a. Dalam prakteknya, kebutuhan untuk memelihara, pengoperasian, dan modernisasi alat angkut TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Dara harus dipenuhi. Agar pemenuhan tersebut dapat membangun pasukan terdepan dan pasukan siaga, serta memodernisasi dan pemeliharaan alutsista juga sarana prasarana

pendukung lainnya untuk mewujudkan MEF yang sudah berjalan. Kemhan dan TNI juga menyebutkan rumus teknis dan penetapan yang ideal untuk anggaran pertahanan yang akan dialokasikan mewujudkan MEF. Ini dimaksudkan supaya instansi pemerintah yang terkait bisa secara cepat dan tepat untuk menetapkan kebijakan anggaran pertahanan.

- b. Profesionalitas sumber daya manusia dalam pertahanan negara harus ditingkatkan. Hal ini harus melalui Pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan prajurit. Seperti melalui, penerimaan hasil yang meningkat, melalui pelayanan kesehatan, dan tersedianya fasilitas tempat tinggal yang layak.

Sebuah negara menggambarkan postur pertahanannya tentang kekuatan negaranya yang mencakupi kekuatan, gelar kekuatan, kemampuan, serta sumber daya nasional. Semua postur pertahanan negara- negara secara menyeluruh hampir dirancang untuk bisa melakukan fungsi penangkalan atau bisa dikatakan memiliki daya tangkal dan juga mampu menjalankan perang jika dibutuhkan. Dengan demikian, postur pertahanan juga seharusnya dirancang atas dasar pertahanan eksternal yang sudah dirumuskan di semua ketentuan penerapan strategi pertahanan. Perancangan kekuatan pertahanan untuk menghadapi kekuatan eksternal sebagai basis pertahanan sebetulnya mempunyai fleksibilitas tinggi agar dapat mengatasi konflik internal. Dan sebaliknya, apabila kemampuan yang sudah dirancang untuk tidak mampu menghadapi konflik eksternal, bisa menggunakan atau menerapkan *center of gravity* dari pertahanan negara.

Dengan demikian, pemikiran atau konsep mengenai MEF bisa menjadi dasar untuk pengembangan postur pertahanan Indonesia. Singkatnya dalam stabilitas kekuatan angkatan darat dan pengembangan yang kemudian

memodernisasi angkatan laut dan angkatan udara. Konsep tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dari keterbatasan untuk mendukung finansial bertujuan untuk mengembangkan kekuatan pertahanan.

Minimum Essential Force (kekuatan minimum pertahanan) merupakan standar kekuatan pokok dan minimum angkatan bersenjata menyeluruh yang mutlak dan sudah disiapkan sebagai persyaratan paling utama dan mendasar untuk mencapai terlaksananya tugas pokok agar berjalan secara efektif dan fungsional menghadapi konflik (ancaman internal) angkatan bersenjata dapat menghadapi ancaman yang paling aktual.¹¹ Perwujudan MEF diprioritaskan untuk peningkatan kemampuan mobilitas TNI AU, AL, AD untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok TNI di seluruh wilayah nasional.

Sektor pertahanan pada kepentingan pokok minimum sebetulnya tidak boleh terlepas dari sistem manajemen pertahanan negara yang sudah tertata. Ada pun unsur- unsurnya yaitu :

1. Unsur dari SDM
2. Alutsista
3. SDA alami maupun buatan
4. Bagian sarana pangkalan
5. Bagian dari industri pertahanan
6. Bagian wilayah pertahanan negara
7. Anggaran

Pada tujuh unsur ini tidak dapat dipisahkan dan harus mendapatkan prioritas utama oleh pemerintah apabila negara ingin memajukan kekuatan militernya. MEF menetapkan keperluan masing- masing matra di pertahanan nasional, yaitu TNI AD, AL, AU. Ulasannya tidak hanya mencakup kondisi alat utama pertahanan dan keamanan yang dimiliki ketiga angkatan tersebut, tapi juga mencakup rencana pengembangan hingga saran atau rekomendasi yang mesti dilakukan untuk mencukupi kebutuhan MEF yang telah digariskan sejak dua tahun silam.

Jika kita melihat beberapa tahun belakangan, sebetulnya pemerintah telah menempuh upaya menjadi integrator antara

kebutuhan atau tuntutan dari ketiga angkatan perang dan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Pada tahun 2010, pemerintah melahirkan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diketuai Presiden dengan Menteri Pertahanan sebagai motor pelaksanaanya.

Dari tangan KKIP dan sejumlah *stakeholder* terkait, dua tahun kemudian lahir Undang-undang nomor 16 tahun 2012 mengenai Industri Pertahanan, yang dasarnya pada peraturan baru tersebut adalah mengusung spirit untuk memberdayakan industri pertahanan dalam negeri. Dokumen KKIP mencatat tiga arahan strategis dari Presiden yang melihat adanya pertautan kepentingan antara pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri dan pemenuhan kebutuhan minimum pertahanan negara.

Kemampuan suatu negara dalam membua sendiri alat peralatan pertahanan dan keamanan (*alpalhankam*) adalah syarat penting membangun kekuatan pertahanan yang mandiri. Terbukti, negara yang militernya kuat adalah negara dengan industri pertahanan yang paling maju. Pemerintah Indonesia sepenuhnya sadar dengan keterkaitan antara pengembangan kekuatan pertahanan dan industri pertahanan. Fase pertama, tahun 2010 – 2014 misalnya mengoptimalkan dan menstabilisasikan industri pertahanan, menyiapkan peraturan industri pertahanan, serta menyiapkan alutsista baru pada masa mendatang (*future weapon*) yang sengaja diarahkan untuk mendukung postur sesuai dengan MEF.

Fase kedua, tahun 2015 – 2019 dilakukan pengembangan industri pertahanan sengaja diarahkan untuk memiliki kemampuan kerja sama produksi dan pengembangan produk baru, seperti *medium tank*, roket, dan kapal selam, yang berguna untuk mendukung pencapaian MEF dan meraih postur kekuatan pertahanan yang ideal. Lalu, fase ketiga, tahun 2020 – 2024, dimana fase ini untuk mendukung postur militer yang ideal, industri harus mampu tumbuh secara signifikan dan

mampu memproduksi alutsista berteknologi canggih lewat kerja sama internasional (*product development-advance technology*). Pemerintah Indonesia pastinya mengharapkan lebih dari ketiga fase tersebut, karena fase keempat, pada rentang tahun 2025 – 2029 harus tercapai. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengharapkan kepada industri pertahanan dapat memiliki kemampuan teknologi untuk berkolaborasi secara internasional, serta mempunyai kemampuan pengembangan produksi yang berkelanjutan (*sustainable*).¹³ Selain itu, diharapkan juga pengembangan industri pertahanan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan alutsista dalam negeri saja, tapi juga menerobos pasar ekspor untuk bersaing secara internasional, dan menjadikan sektor industri pertahanan sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi (*economic growth support*).

Di daerah wilayah Asia Pasifik, sebagian besar negara di kawasan tersebut dikelilingi oleh laut yang membutuhkan angkatan laut yang mampu menjaga jalur laut yang terbuka dengan peralatan dan sistem modern, termasuk kapal selam. Kapal selam memainkan peran penting dalam strategi pertahanan, karena sulit ditemukan dan sulit untuk dihancurkan ketika jauh di permukaan laut. Pengadaan kapal selam di Asia merupakan hal yang tidak penting, tapi sekarang tidak lagi. Dikarenakan, biaya yang tinggi untuk mengoperasikan armada kapal selam dan kurangnya pemahaman akan pentingnya kapal selam.

Sekarang di era modern, kapal selam sangat penting dan relative murah untuk mengoperasikan diesel listrik di kapal selam sendiri. Memiliki armada kapal selam merupakan salah satu pilihan bagi negara-negara di Asia untuk memperkuat pertahanan laut. Sebagian besar negara kaya di Asia Pasifik dari segi ekonomi dan sumber daya sudah mampu meningkatkan kualitas angkatan laut mereka dengan membeli kapal selam diesel listrik. Pengecualian seperti Tiongkok dan India mencoba menambahkan kapal selamnya bertenaga nuklir untuk armada

angkatan laut mereka. Perlombaan ini sedang pada masanya untuk menunjukkan angkatan laut siapa yang dapat mengikuti perkembangan kemampuan maritimnya.

Dalam tatanan geopolitik di Asia Timur, Korea Selatan merupakan salah satu negara yang maju dan memberikan perhatian besar terhadap perkembangan industri pertahanan. Sejak meletusnya perang di Semenanjung Korea, Korea Selatan menyadari masih memiliki musuh yang nyata, yaitu Korea Utara. Selain Tiongkok, Korea Selatan merupakan negara yang serius membangun industri pertahanan. Pemerintahannya sudah menerapkan kebijakan pemberian insentif fiskal bagi industri pertahanan. Kebijakan tersebut merupakan langkah yang menunjukkan keseriusan negara Korea Selatan dalam memandang pentingnya kehidupan industri pertahanan untuk memacu pertumbuhan dan pengembangan penguasaan teknologi pertahanan nasional.

Jejak rekam Indonesia tidak terlalu bagus pada pemenuhan peralatan militer yang dibutuhkan untuk peningkatan kapabilitas pertahanannya. Hal ini berkaitan dengan tekanan politik dari negara industri maju yang bentuknya bisa mengembargo senjata. Seperti munculnya isu pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur di tahun 1990-an. Dengan munculnya embargo tersebut, Indonesia dijadikan negara dengan kebutuhan terhadap alutsista pertahanan yang tinggi dan mengakibatkan terbatasnya pada pemenuhan kebutuhan pertahanannya. Walaupun pemerintah Indonesia membangun kebijakan strategis dalam rangka mengembangkan dan merevitalisasi (memodernisasi) peralatan kekuatan alutsista TNI dengan menggunakan produksi dalam negeri sebagai pemenuhan kebutuhan peralatan pertahanan. Industri pertahanan Indonesia tersebut adalah PT DI, PT PAL Indonesia, dan PT Pindad. Tapi hal tersebut dianggap tidak memadai jika sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pertahanan Indonesia.

Sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer memang dilakukan oleh TNI yang ditunjuk sebagai komponen utama dengan dukungan oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Tentunya, dalam menghadapi ancaman nirmiliter, sistem pertahanan negara harusnya ditempatkan di lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur paling utama. Hal ini dilihat sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan dukungan dari unsur kekuatan bangsa.

RPJMN 2010 – 2014 menetapkan MEF adalah sebuah amanat pembangunan nasional di bidang pertahanan keamanan yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Tujuan dari sumber kepentingan yang paling utama dari kebijakan MEF agar bisa mengoreksi faktor perencanaan, mekanisme anggaran dan penyelenggaraan pertahanan agar tidak menyimpang dari sistem untuk pengambilan keputusan dari pertahanan negara. MEF juga harus diselaraskan untuk mengupayakan terobosan percepatan dalam mengatasi kendala deviasi anggaran MEF berwujudan capaian MEF tahun 2010 – 2014.

Kenyataannya MEF dibangun untuk mewujudkan kekuatan optimal dalam memberdayakan sumber daya nasional yang sudah ada dan membangun sesuai dengan kemampuan ekonomi nasional.¹⁵

Saat ini pengembangan industri diranah pertahanan pada alutsista terus diperkuat oleh pemerintah. Peran industri pembuatan dan perakitan (integrator) alutsista di Indonesia berada di BUMN industri strategis di bawah Kementerian BUMN, yaitu PT. Dirantara Indonesia yang memproduksi pesawat, PT.PAL Indonesia yang membuat kapal, dan PT. Pindad yang memproduksi panzer dan senjata. Saat ini, Kementerian Perindustrian fokus pada industri komponen penyusun alutsista, misalnya radar, komponen senjata, dan personel truk. Pada dunia modern sekarang, satu alutsista lengkap tidak harus dibuat sendiri oleh satu negara atau satu produsen. Satu negara dengan yang lainnya

biasanya sudah saling melengkapi untuk pengadaan komponen penyusun alutsista tersebut.

Kali ini, Kemenperin bekerja sama dengan investor asing untuk membangun pabrik komponen alutsista Indonesia. Pengadaan komponennya tidak selalu mutlak berupa sistem produksi peralatan tetapi seperti komponen otomotif, kapal, elektronik, dan teknologi informasi yang diandalkan untuk menunjang sistem pembuatannya. Kemudian, industri pertahanan dan keamanan bisa menjadi pilar strategis yang mendukung perekonomian nasional karena strategisnya. Jadi, pemerintah pun menyiapkan dana 99 triliun rupiah untuk pembelian dan pembaharuan alutsista pada MEF periode 2010 – 2014 lalu.

Dalam mendukung industri pertahanan tersebut, Indonesia masih mengalami masalah serius pada pengadaan alutsista. Diyakini masih menggunakan jasa perantara dan pemesanan maupun pengerjaannya tidak transparan. Karena menggunakan jasa perantara (broker), maka pengeluaran pemerintah membengkak dikarenakan perusahaan persenjataan tempur harus memberikan komisi kepada perantara tersebut. Perantara tersebut sering juga mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam hal koneksi politik kuat pada pihak-pihak tertentu. Seharusnya, pemerintah teliti bahwa anggaran dan pengadaan alutsista harus transparan, jelas proses pembelannya dan tidak bersifat rahasia. Banyaknya dana yang terbuang untuk menyewa jasa perantara dilihat sangat tidak seimbang dan membuat kualitas alutsista di Indonesia bobrok. Contoh, banyaknya kasus kecelakaan karena alutsista yang telah usang.

Di sisi yang lain, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) memiliki fungsi memastikan pengadaan alutsista tidak melibatkan perantara atau broker. Prosesnya harus dimulai dari interaksi antara pemerintah dengan pemerintah, *government to government*. Terlibatnya broker pada pembelian alutsista berpotensi memunculkan

permainan harga. Proses pengadaan alutsista di TNI juga diatur pada Peraturan Menteri Pertahanan No. 17 tahun 2014, dimana disebutkan tujuh prinsip yang harus dipatuhi pejabat yang melaksanakan pengadaan alutsista, yaitu efisien, efektif, transparan dalam pengelolaan anggaran, menjamin kerahasiaan, beraing, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Pengadaan senjata yang memenuhi etika, antara lain tidak saling memengaruhi yang berakibat pada persaingan tidak sehat, dan tidak menerima atau menawarkan komisi pada siapa pun yang berkaitan dengan proses pengadaan persenjataan. Dalam pelaksanaannya semenjak terbentuk hingga sekarang, KKIP ternyata belum mampu bekerja maksimal dalam memastikan pengadaan alutsista yang baik bagi pemerintah RI. Dalam berbagai kasus, KKIP dilewatkan begitu saja dalam berbagai pengadaan seperti kasus pengadaan Helikopter Agusta Westland AW101 oleh TNI AU yang merugikan negara 224 Miliar Rupiah.

Padaprakteknya, para broker memiliki dua model rekanan, yaitu rekanan kerja dan rekanan tidak kerja. Keduanya muncul karena kesempatan sudah diciptakan. Rekanan kerja biasanya muncul karena dibayar produsen dan ditunjuk secara resmi misalnya perwakilan resmi Rosoboroneexport Rusia merupakan lembaga resmi pengeksport alutsista Rusia di Indonesia. Sedangkan rekanan yang tidak kerja, biasanya sudah memiliki koneksi sendiri dan juga sudah mengadakan rapat dengan para pembuat kebijakan. Rekanan tidak kerja ini biasanya memiliki perusahaan sendiri yang tidak terikat secara resmi dengan pihak produsen senjata tempur yang ada contohnya PT Trimarga Rekatama yang menjadi perantara dalam pengadaan pesawat tempur Sukhoi. Dalam pelaksanaan di lapangan, rekanan tidak kerja inilah yang lebih banyak bermain dalam praktik lobi- lobi kepada para pemangku kebijakan.

Dalam menjalankan bisnisnya ini, biasanya para broker telah memiliki “telinga” di internal Kementrian Pertahanan RI untuk mengetahui

kebutuhan dan rencana pembelian alutsista yang akan segera dilakukan. “telinga” ini diperlukan karena dalam berbagai pengadaan seringkali dirahasiakan dari publik guna menjaga kerahasiaan kekuatan militer RI. Selanjutnya, setelah mengendus kebutuhan tersebut maka mulailah para broker bergerak untuk mempromosikan barang dagangannya kepada para pemangku kebijakan yang ada.

Upaya promosi peralatan tempur ini dilakukan dengan berbagai macam cara. Mulai dari mengundang para pemangku kebijakan pengadaan alutsista tersebut ke berbagai pameran peralatan tempur yang ada seperti di Singapura dan Australia untuk memperlihatkan secara langsung peralatan tempur yang didagangkannya. Jika masih belum cukup, para broker juga akan membawa para pengambil keputusan untuk kenayamanan dan kemudahan mulai dari akomodasi, uang saku dan berbagai kebutuhan lainnya.

Sebagai contoh pelaksanaan lobi ini dapat dilihat pada usaha penjualan Spartan, pesawat angkut produksi Alenia Aeronautica asal Italia. Dimana dalam praktik lobi-lobi yang dimotori oleh PT Trimarga Rekatama. Walaupun rencana pembelian pesawat tempur ini dirahasiakan oleh Kementerian Pertahanan, tetap saja dapat diketahui oleh para makelar sehingga ditawarkanlah Pesawat angkut Spartan ini untuk menggantikan pesawat angkut Fokker-27 yang sudah uzur. Dalam praktiknya delegasi Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, dan Panitia Kerja Alat Utama Sistem Persenjataan Dewan Perwakilan Rakyat dibawa bertolak ke Italia. Agendanya meninjau industri pertahanan setempat bepergian ke negara asal pabrik peralatan tempur itu berada. Di sana, rombongan stakeholders ini akan dijamu dengan segala fasilitas dimana salah satunya adalah meninjau ke pabrik pembuatan Spartan. Usaha-usaha lobi ini merupakan bentuk keseriusan dalam menawarkan produk tempur para perusahaan yang dijembatani oleh para broker lokal.

Keinginan setiap negara untuk selalu dapat meningkatkan kemampuan pertahanan dan

keamanan negara adalah dengan cara meningkatkan kemampuan militernya. Adanya kemampuan militer yang canggih, maka negara tersebut memiliki kemampuan diri yang selalu diandalkan untuk menghadapi ancaman, baik internal atau pun eksternal. Dikaitkannya militer dengan dunia industri memang tidak dapat dibantahkan. Ini dikarenakan sebuah industri pertahanan selalu bergantung kepada kontrak militer. Pelaku militer pun selalu mengandalkan pasokan-pasokan senjata hasil dari ciptaan industri pertahanan untuk menunjukkan betapa hebat kekuatannya dari pihak lain. Semenjak itulah, istilah *military industrial complex (MIC)* sangat populer di dunia.

Idealnya, konsep MIC digunakan dan merujuk kepada kebijakan dan hubungan keuangan antara legislator, angkatan bersenjata nasional, dan industri pertahanan (Higgs, 1995). Singkatnya, MIC merupakan sebuah aliansi informal antara militer suatu negara dan industri senjata yang memasok sebagai kepentingan negara yang mempengaruhi kebijakan publik. Pemerintah Indonesia sadar bahwa alutsista Indonesia dari segi kualitas dan kuantitas harus lebih ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan geografis Indonesia. Masalah genting lainnya seperti sistem pertahanan Indonesia adalah teknologi, bahwa sebuah kekuatan pertahanan negara dunia saat ini tidak hanya sekedar didukung oleh kekuatan SDM aktif yang besar melainkan teknologi dan SDM yang paham dengan teknologi tersebut. Oleh karena itu dalam menjalankan rencana strategis pencapaian MEF bagi Militer RI, pertimbangan alih teknologi militer juga menjadi pertimbangan termasuk dalam pengadaan kebutuhan Kapal Selam bagi TNI AL.

Dalam upaya pengadaan kapal selam tersebut, tercatat ada beberapa perusahaan produsen kapal selam yang tertarik antara lain Pemerintah Rusia dengan kapal selam kelas Kilo dan DCNS Perancis dengan kapal selam Scorpenenya. Namun dengan berbagai

pertimbangan, maka pemerintah Indonesia memesan kapal selam kelas Changbogo ke Korea Selatan. Mengingat masih kurangnya kebutuhan akan kapal selam bagi TNI AL. Akhirnya, pemerintah Indonesia memesan tiga buah kapal selam kelas Changbogo ke Korea Selatan dengan persyaratan adanya alih transfer teknologi (ToT) kepada PT PAL Indonesia, dimana kapal selam ketiga akan dibuat di Indonesia dengan terlebih dahulu dikirim tim peneliti dari Indonesia guna mempelajari teknologi pembuatan kapal selam dalam pembuatan kapal selam pertama dan kedua di Korea Selatan. Pemesanan tersebut melalui sebuah perusahaan pembuat kapal Korea Selatan, *Daewoo Shipbuilding Marine Engineering* (DSME). Sebelumnya, kontrak pemesanan sudah ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan dan DSME di Jakarta, 21 Desember 2011. Dana yang digunakan untuk membeli 3 kapal selam senilai 1,07 miliar dolar AS.

Di lain sisi, Indonesia juga memiliki rencana untuk membeli kapal selam kelas Kilo. Kapal selam kelas Kilo ini juga memiliki efek *deterrence* yang dahsyat antar negara-negara di kawasan. Kapal selam ini memiliki teknologi yang canggih, seperti mampu beroperasi dengan tenang dan tidak memiliki suara yang gaduh. Bahkan, kapal selam kelas Kilo ini merupakan salah satu kapal selam yang menghasilkan suara terlemah di dunia. Hal ini sangat efektif mengingat fungsinya sebagai anti kapal permukaan dan anti kapal selam. Tentu saja, pengadaan kapal selam kelas Kilo akan dipesan setelah 3 unit kapal selam Changbogo datang dari Korea Selatan. Tetapi, banyak pihak mengatakan setelah Indonesia memiliki tiga unit kapal selam Changbogo tersebut masih dirasa belum cukup untuk memperkuat poros maritim laut Indonesia. Kapal selam Changbogo juga dirasa kelasnya belum begitu canggih daripada kapal selam kelas Kilo, karena kapal selam kelas Kilo memang memiliki kemampuan dan perkengkapan senjata yang lebih baik.

Pada praktiknya, Indonesia memesan kapal selam kelas Changbogo untuk pertahanan lautnya. Dari sekian banyak kapal selam yang ditawarkan seperti di atas, dipilih Changbogo karena pertimbangan dana dan menang tender. Spesifikasi Changbogo yang milik Korea Selatan merupakan perbauran dari kapal selam buatan Jerman. Hanya, Changbogo diberikan tambahan panjang lambung pada bagiannya setara KS Tipe 209/1400 dan Tipe 209/1500, kapal selam buatan Jerman yang dipesan oleh Angkatan Laut Portugis dan Israel. Kemampuannya meluncurkan rudal sub-Harpoon dengan penggunaan sistem AIP dan sistem akustik penangkal torpedo baru yang dikembangkan di Korea Selatan secara mandiri. Selain itu, Changbogo juga dilengkapi torpedo kelas berat baru buatan Korea Selatan, yaitu *White Shark* (Baek Sang Eo Torpedo) yang memiliki kemampuan meluncurkan rudal anti kapal permukaan *Hae Sung*

Adalah makelar senjata Nyoman Sarimin yang berperan memuluskan terpilihnya DSME dengan sebelumnya sukses mencegah rencana pembelian kapal selam Scorpen dari Prancis dan Kilo Class buatan Rusia. Nyoman memang gesit, karena gaya bisnis Korea lebih memungkinkan ia punya sumber dana buat melobi.²¹ Keterlibatan Nyoman Sarimin sebagai makelar ini juga diamini oleh Beni Sukadis, Ketua Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia yang menjelaskan bahwa dalam pembelian kapal selam ini juga melibatkan broker yang sama dengan pembelian pesawat T-150 Eagle milik Korea Selatan yaitu Sarimin. Ditambahkan oleh Adnan Pandu Pradja, Koordinator Indonesia Corruption Watch yang menyebutkan bahwa sepak terjang Sarimin ini telah dimulai sejak era orde baru dan tetap eksis hingga sekarang. Dalam melakukan praktek broker dalam pengadaan kapal selam ini, Nyoman Sarimin menggunakan PT Osco Utama sebagai perusahaan perantaranya. PT Osco Utama ini merupakan bagian dari grup usaha Jumbo Karya Agung yang juga membawahi PT Multi

Eka Karma yang menjadi perantara dalam pembelian pesawat T-150 Eagle.

Usaha yang dilakukan oleh Nyoman Sarimin dan DSME selaku pabrik yang memproduksi kapal selam ini cukup beragam dan berusaha untuk melakukan lobi ke berbagai lapisan pemerintah mulai dari eksekutif hingga legislatif. Usaha untuk memanjakan para pemangku kebijakan Indonesia ini dapat terlihat pada saat kunjungan rombongan Menteri Koordinator Perekonomian RI di masa itu Hatta Rajasa pada pertengahan Februari 2011 dimana digunakan Pesawat Kepresidenan Korea Selatan untuk mengangkut rombongan tersebut. Memang rombongan yang berisikan 50 pejabat dan pengusaha asal Indonesia itu selain bertujuan menjajak peluang investasi, juga ditujukan untuk membahas kerjasama pembelian alat tempur termasuklah Kapal Selam kelas Changbogo buatan Daewoo Shipbuilding Marine Engineering ini. Selain, pelayanan pesawat kepresidenan, disebutkan bahwa upaya memanjakan para pemangku kepentingan itu cukup lengkap mulai dari menyiapkan mobil hingga membawa berkeliling negeri dengan uang saku tentunya.

Karena letak wilayah Indonesia yang memiliki lokasi strategis yang mana berada di posisi persilangan jalur perdagangan dan pelayaran internasional, hal tersebut menjadikan Indonesia merupakan wilayah transit dari banyak negara yang memiliki kepentingan. Hal itu membuat Indonesia rawan ancaman dari pertahanan dan keamanan negaranya di laut. Ancaman yang mempengaruhi biasanya timbul tidak saja disebabkan oleh hubungan geografis Indonesia, tapi bisa juga dipengaruhi oleh faktor globalisasi. maupun perkembangan lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis. Perkembangan tersebut selalu dipengaruhi oleh bangsa atau negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Trennya adalah penggunaan sistem atau teknologi yang sama, intervensi suatu negara apabila negara tersebut memiliki kekuatan dari segi

militernya. Hal ini membuat Indonesia berpikir ulang untuk memiliki persenjataan yang mumpuni. Bukan untuk berperang melainkan untuk bertahan dari ancaman-ancaman yang akan datang atau ancaman masa depan.

Dengan diadakannya proyek MEF, pemerintah butuh banyak sekali alutsista yang harus dimiliki oleh elemen angkatan militer dari segi pertahanan. Sulitnya pengadaan alutsista tersebut diduga adanya broker-broker yang ikut masuk ke dalam pengesahan kebijakan kontrak antara pemerintah dan penjual alutsista. Termasuk dalam pengadaan kapal selam bagi TNI AL. Proses pengadaan kapal selam dimana yang terpilih untuk melakukan pengadaan adalah DSME Republik Korea ternyata terbukti adanya kepentingan industri swasta dalam hal ini DSME Republik Korea yang turut mempengaruhi pengambilan kebijakan tersebut melalui praktek-praktek lobi dan broker. Hal ini membuat kebijakan pengadaan yang diambil menjadi tidak maksimal dan menghambat pencapaian MEF bagi militer RI dalam hal ini TNI AL. Kerugian ini juga dapat dilihat dari kualitas kapal selam Changbogo yang masih di bawah kapal selam lainnya seperti Kilo dari Rusia serta terhambatnya praktek ToT terhadap para insinyur Indonesia dalam mempelajari teknologi Kapal Selam.

KESIMPULAN

Indonesia memang disebut negara kepulauan terbesar di dunia, karena letaknya yang strategis yaitu diantara benua Asia dan benua Australia. Ditambah berdekatan dengan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Karena hubungan tersebut Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat mempengaruhi beberapa faktor seperti ekonomi, politik, dan keamanan nasional Indonesia. Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki ancaman dengan pertahanan dan keamanan negara di laut, seperti ancaman yang mempengaruhi konsep dan strategi pertahanan negara dan timbul tidak saja disebabkan oleh hubungan geografis

Indonesia, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor globalisasi di era pasca Perang Dingin, maupun perkembangan lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis. Untuk mengantisipasi ancaman yang akan muncul baik dalam maupun luar negeri, kekuatan militer Indonesia harus memiliki persiapan yang kuat baik dari persenjataan maupun alusista yang lainnya. Walaupun kekuatan militer Indonesia masuk kedalam 20 militer terkuat didunia, namun dari segi persenjataan dan alusista lainnya kelengkapan militer di Indonesia masih belum memadai dari kelengkapan militer negara lainnya. Dengan melihat perkembangan dunia saat ini, seharusnya Indonesia memperbaharui kekuatan militer baik dari persenjataan militer maupun alusista militer untuk mengantisipasi ancaman yang kemungkinan akan muncul baik dari dalam maupun luar negeri. Namun apabila dilihat saat ini, terbatasnya pengadaan persenjataan dan alusista militer dikarenakan adanya broker – broker yang muncul antara hubungan dua negara dalam pengadaan barang tersebut. hal tersebut dapat dilihat dari adanya hubungan kerjasama antara Indonesia dan Korea selatan dalam pengadaan kapal selam yang mana hal tersebut tidak lepas dari adanya broker di Indonesia dimana kualitas alusista dari Korea Selatan secara kualitas masih kurang memadai dari kapal selam Rusia yang menyebabkan kerugian bagi pihak pemerintah Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Ah Dictionary. *Definition of Military Industrial Complex*. Tersedia di <https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=military+industrial+complex&submit.x=0&submit.y=0> [Diakses 3 Maret 2017]
- American Heritage. (September 2001). Douglas Brinkley. *Eisenhower; His farewell speech as President inaugurated the spirit of the 1960s*. American Heritage. Tersedia di http://www.americanheritage.com/articles/magazine/ah/2001/6/2001_6_58.shtml [Diakses 3 Maret 2017]
- Balitbang Kementerian Pertahanan. (2005). *Konsepsi Postur Pertahanan Negara 2004 – 2014*. Tersedia di <http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/konsepsi-postur-pertahanan-negara-2004-2014> [Diakses 25 Februari 2017]
- Binkorps Pelaut TNI AL. Laksamana Madya TNI Marsetio. (2011). *Kepentingan Nasional di Laut dalam Perspektif Maritime Domain Awareness*. Tersedia di http://binkorpspelaut.tnial.mil.id/index.php?option=com_content&view=article&id=34:Kepentingan-nasional-di-laut-dalam-perspektif-maritime-domain-awareness&catid=28:fgd-mda-wakasal [Diakses 1 Maret 2017]
- Bisnis Tempo. (2013). APBN 2014 Kementerian Pertahanan dapat Anggaran Terbesar. Tersedia di <https://bisnis.tempo.co/read/news/2013/08/16/090504901/apbn-2014-kementerian-pertahanan-dapat-anggaran-terbesar> [Diakses pada 20 Februari 2017]
- Brinkley Douglas. (September 2001). *Eisenhower; His Farewell Speech as President Inaugurated the Spirit of the 1960's*. American Heritage.
- Boutin, J.D. Kenneth. (2009). *Emerging Defense Industries: Prospects and Implications*. Richard A. Bitzinger. *The Modern Defense Industry*. California: ABC-CLIO-LLC.
- Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia*. (2008). Departemen Pertahanan Republik Indonesia. Jakarta: Dephan RI.
- Buzan, Barry., Wæver, Ole., de Wilde, Jaap. (1998). *Security a new framework for analysis*. Colorado: Lynne Rienner Publisher.
- Buzan, Barry., Wæver, Ole. (2003). *Regions and Power, The Structure of International Security*. New York: Cambridge University Press.
- DCNS. (n.d.). *SSK Scorpene Class Attack Submarine, France*. Retrieved Mei 20, 2017, from Naval Technology: <http://www.naval-technology.com/projects/scorpene>
- Departemen Keuangan. (2013). *Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Tersedia di <http://www.anggaran.depkeu.go.id?content/RAPBN.pdf> [Diakses pada 20 Februari 2017]

- Detik. (2014). Kapal Selam Canggih yang Dipesan RI dari Korsel mulai Melaut. Tersedia di <http://news.detik.com/berita/3172470/kapal-selam-canggih-yang-dipesan-ri-dari-korsel-mulai-melaut> [Diakses 21 Februari 2017]
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2011). *Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR-RI ke Seoul, Busan Republik Korea Selatan*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Doktrin TNI AL. (2006). *Eka Sasana Jaya*. Jakarta: Mabesal.
- DPR RI. (2009). Laporan Kunjungan Delegaasi Komisi DPR-RI ke Negara Korea Selatan tanggal 26 Juni - 2 Juli 2009. Tersedia di http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1_kunjungan_Kunker_Komisi_I_DPR_RI_ke_Korea_Selatan.doc [Diakses 18 Februari 2017]
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Global Fire Power. (2016). Countries ranked by Military Strength. Tersedia di <http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp> [Diakses pada 20 Februari 2017]
- Hayek, F.A. (1976). *The Road to Serfdom*. London: Routledge.
- Hidayat, B. (2012, Oktober 28). Semut Kehilangan Gula. *Tempo*, p. 36
- James, Kraska & Pedrozo, Raul. (2013). *International Maritime Security Law*. Keiden & Boston: Martinus Nijhoff.
- KBRI Seoul. (2014). Bilateral Relations. Tersedia di <http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/en/relations> [Diakses 20 Februari 2017]
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2008). 'Buku Pertahanan 2008'.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014). Paparan Menteri Pertahanan Selaku Ketua Harian KKIP pada Sidang Pertama KKIP. Surabaya: Komite Kebijakan Industri Pertahanan.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kemhan. (2013). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pertahanan RI Tahun 2013. Tersedia di <http://renhan.kemhan.go.id/files/lakip2013.pdf> [Diakses 20 Februari 2017]
- Klein, Nathalie. (2011). *Maritime Security and the Law of the Sea*. Oxford & New York: Oxford University Press.
- Krepinevich, Andrew. (1994). *Cavalry to Computer*. National Interest No. 37.
- Maritimnews. (n.d.). *Mengapa Indonesia Perlu Kapal Selam Konvensional Jarak Jauh*. Retrieved Juni 11, 2017, from 2017: <http://maritimnews.com/mengapa-indonesia-perlu-kapal-selam-konvensional-jarak-jauh>
- Merdeka. (2014). Ini perbandingan kekuatan militer Indonesia Vs Singapura. Tersedia di <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-perbandingan-kekuatan-militer-indonesia-vs-singapura/jumlah-personel-militer-dan-cadangan.html> [Diakses 22 Februari 2017]
- Mitnick, Barry. M. (1980). *The Political Economy of Regulation: Creating, Designing, and Removing Regulatory forms*. New York: Columbia University Press.
- Mofa. (2014). Sejarah Hubungan Diplomasi. Tersedia di <http://idn.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/idn/bilateral/politik/sejarah/index.jsp> [Diakses 19 Februari 2017]
- New York Times. (25 Januari 2011). James Ledbetter. *Guest Post: 50 Years of the "Military-Industrial Complex"*. Schott's Vocab. Tersedia di <http://schott.blogs.nytimes.com/2011/01/25/guest-post-james-ledbetter-on-50-years-of-the-military-industrial-complex/> [Diakses 3 Maret 2017]
- Oke News Zone. (2016). Kekuatan Militer Indonesia ini bikin Negara Tetangga Ketar-Ketir. Tersedia di <http://news.okezone.com/read/2016/02/10/337/1308688/kekuatan-militer-indonesia-ini-bikin-negara-tetangga-ketar-ketir> [Diakses 22 Februari 2017]
- Paradigm Publishers. (Juni 2007). Henry Giroux. *Confronting the Military Industrial Complex Academic Complex*. Tersedia di <http://www.paradigmpublishers.com/Books/BookDetail.aspx?productID=168000> [Diakses 3 Maret 2017]
- Peraturan Presiden RI. (2008). 'Peraturan Presiden RI NO. 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara'.

- Peraturan Menteri Pertahanan RI. (2012). 'Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force'
- Peraturan Menteri Pertahanan RI. (2014). 'Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia'
- Peraturan Panglima TNI. (2010). 'Doktrin Tentara Nasional Indonesia, Tri Ekakarma'. Lampiran Peraturan Panglima TNI No. Perpang/45/VI/2010.
- Prasetyo, E. (2009, November 24). *Postur Pertahanan : Apakah yang dimaksud MEF, Minimum Essential Force (Kekuatan Pokok Minimum)?* Retrieved Mei 28, 2017, from DEPOHAR 50: <http://www.blog.depohar50.info/2009/11/postur-pertahanan-apaakah-yang-dimaksud.html>
- Pratomo, S. (2014, Juni 26). *Prancis Siap Alih Teknologi Kapal Selam untuk Indonesia*. Retrieved Mei 20, 2017, from Metrotvnews: <http://news.metrotvnews.com/read/2014/06/26/257878/8203-prancis-siap-alih-teknologi-kapal-selam-untuk-indonesia>
- Presidential Regulation. (2010). 'Presidential Regulation No.5 Tahun 2010'. RPJMN 2009-2014.
- Portal Informasi Terkini. (2016). *Inilah Perbandingan Lengkap Kekuatan Militer dan Alutsista Indonesia vs Malaysia Terbaru 2016*. Tersedia di <http://www.dicub.id/2016/02/perbandingan-kekuatan-militer-indonesia-vs-malaysia-2016.html> [Diakses 22 Februari 2017]
- Reaching Critical Will. (2014). *Military Industrial Complex*. Tersedia di <http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Resources/Factsheets/mic.pdf> [Diakses 2 Maret 2017]
- Republika. (2012, Mei 6). *Inilah Rahasia Indonesia Beli Kapal Selam Korsel*. Retrieved Mei 20, 2017, from Republika Online: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/05/06/m3lo7x-inilah-rahasia-indonesia-beli-kapal-selam-korsel>
- Republika. (2014, Juni 26). *Pro-Kontra Kapal Selam Kelas Kilo*. Retrieved Mei 20, 2017, from Republika Online: <http://www.republika.co.id/berita/koran/podium/15/09/30/nvha461-prokontra-kapal-selam-kelas-kilo>
- Ristek. Syahrul Aminullah. *Mengubah Skenario Anggaran Iptek Nasional*. Tersedia di <http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/9261> [Diakses 23 Februari 2017]
- Serba Sejarah. (2005). *Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia*. Tersedia di <https://serbasejarah.files.wordpress.com/2014/08/evolusi-doktrin-pertahanan-indonesia-andi-widjajanto1.pdf> [Diakses 28 Maret 2017]
- Srenal, 2015. *Makalah Kepala Staf TNI AL : Langkah-langkah strategis TNI AL Dalam Mendukung PMD*.
- Supandi, Ade KSAL Laksmana TNI. (2016). 'Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran dan Keuangan I (Rakor Renaku)'
- Stake, Robert. E. (2010). *Qualitative Research: Studying How Things Work*. New York: Guilford Press.
- UNCLOS 1982. 'Ratifikasi UU No. 17 Tahun 1985'.
- USA Today. (10 Desember 2010). John Milburn. *Papers shed light on Eisenhower's farewell address*. Associated Press. Tersedia di http://www.usatoday.com/news/nation/2010-12-10-eisenhower-address_N.htm [Diakses 3 Maret 2017]
- United Nation. Tersedia di http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf [Diakses 2 Maret 2017]
- Wijaya, I. (2013, Juni 26). *Ini Alasan Korea Batasi RI Belajar Kapal Selam*. Retrieved Mei 20, 2017, from Tempo.co: <https://m.tempo.co/read/news/2013/06/26/078491478/ini-alasan-korea-batasi-ri-belajar-kapal-selam>
- Wise Pen Final Report. (2010). 'Maritime Surveillance in Support of CSDP'.
- Yophiandi, O. W. (2011, Maret 21). *Dibalik Layanan Elang Emas dalam Alat Tempur*. *Majalah Tempo*.

BIOGRAFI

Wawan Budi Darmawan adalah pengajar pada program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran yang mendalami kajian mengenai Keamanan Global.

Jafar Alkadrie merupakan mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Tertarik mengkaji tentang Industri Pertahanan.

Arfin Sudirman adalah pengajar pada program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran yang mendalami kajian mengenai Keamanan Maritim.